



INTISARI

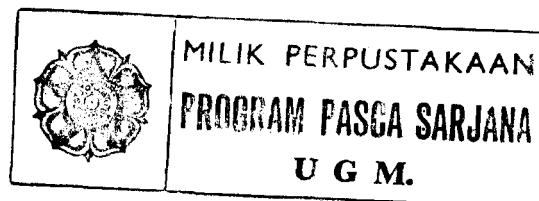
Penelitian ini merupakan studi literatur dengan metode kajian pustaka, interpretasi teks dan interpretasi data yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pengkayaan ide dan gagasan dari berbagai literatur yang ada, sekaligus mengambil beberapa data sekunder untuk lebih menguatkannya.

Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan partisipasi politik dalam kaitan dengan implementasi dari sistem pembangunan yang dianut pemerintah Orde Baru. Apa fungsi partisipasi bagi pemerintah dan hambatan apa saja yang melemahkan partisipasi politik, merupakan sisi lain telaahan penelitian ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, teori pembangunan politik dan partisipasi politik sangat membantu. Selain didekati melalui model pembangunan teknokratik, perspektif dari para *Indonesianist* juga memberi andil besar dalam mengungkap kondisi partisipasi politik masa Orde Baru.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa partisipasi politik pada masa Orde Baru (1966-1992) rendah, berlangsung terbatas pada para pejabat, teknokrat sekitarnya, dan pemodal besar. Peran politik warga masyarakat hanya jelas saat pemilu, itupun cenderung berifat mobilisasi ketimbang partisipasi politik mandiri. Partisipasi politik bagi pemerintah lebih sebagai sarana legitimasi kekuasaannya.

Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa hambatan partisipasi politik bukan karena alasan teknis, melainkan terutama hambatan struktural dan sistemik. Sumbernya ada dalam struktur dan sistem pembangunan (ekonomi dan politik) yang diterapkan secara nasional. Perubahan pada aras masyarakat baru berlangsung bila lebih dahulu ada perubahan pada aras negara.





ABSTRACT

This research is a literature study using the method of literature examination, text and relevant data interpretation. Therefore, the research has more focus on idea and opinion enrichment from various available literatures, and simultaneously takes the secondary data to give more support on the idea.

Substantially, the study examines the development of political participation related to the development strategy applied by the New Order Government. The function of political participation for the government and the factors weakening the political participation to date, also become the examined materials in the study.

To realize the above objectives, the application of the political development concepts and political participation will be very helpful. Besides using the technocratic development model, the perspective of some Indonesianists are also gives a big role in discovering political participation condition in the New Order era.

The study shows that the political participation up to 1990s was still weak and its only occurred to function in a small amount of power elite. The political participation of the people only accurred clearer during the period of general election, but this has tended to have mobilization characteristic rather than an independent political participation. For the government, political participation becomes the means for legitimizing its power.

The results of the discussion showed that the hindrance in extending the political participation is not caused by the technical reasons but it tends to be structural and systemic resistance. Its source is contained in the structure and system of (economic an political) development nasionally applied. The transformation at the people's level would possible to be reached when there is a change at the level of state.

